

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat secara umum memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat. Pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengatur, mengelola dan memberdayakan daerah masing-masing. Melalui pemberdayaan tersebut pemerintah mengupayakan berbagai program pembangunan sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan hidup dalam pemenuhan kebutuhannya.

Mardikanto menjelaskan bahwa pemberdayaan dalam sebuah pemerintahan merupakan proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi memenuhi kehidupannya dalam bentuk keterampilan, dan pengetahuan.¹ Selanjutnya Suharto menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kekuasaan aparat atau pemberdaya untuk memberdayakan masyarakat sehingga mengikuti kehendak pemberdaya atau penguasa tersebut.² Pemberdayaan masyarakat nelayan berkenaan dengan peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat nelayan. Pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah dilakukan secara terprogram berdasarkan perencanaan yang matang sejalan dengan pembangunan.

Masalah utama yang dihadapi oleh para nelayan di Marapokot adalah :

1. Aspek sosial

¹Mardikanto,T dan Soebiato,P.(2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*.Bandung:Alfabeta. Hlm.28

²Suharto,F,2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat .Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. PT Refika Aditama, Bandung.Hlm. 45

- a. Masih lemahnya kesadaran masyarakat terhadap ancaman kerusakan pesisir, (*seperti Gambar 1.1 pada lampiran*).
- b. Masih kurangnya keterlibatan dan kemampuan masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara aktif dalam upaya pelestarian lingkungan serta proses pengambilan keputusan untuk pengelolaan sumber daya pesisir.

2. Aspek ekonomi

- a. Belum dilaksanakannya secara optimal dan berkelanjutan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir karena keterbatasan modal, sarana produksi, pengetahuan dan keterampilan, serta faktor eksternal seperti keterbatasan pelayanan dan penyediaan fasilitas oleh pemerintah.
- b. Masih perlu ditingkatkannya koordinasi dalam penyusunan perencanaan dan pengambilan keputusan oleh instansi-instansi pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembangunan pesisir.

3. Aspek pendidikan.

Tingkat pendidikan dan pengetahuan masih rendah rata-rata tingkat pendidikan masyarakat nelayan di pesisir Marapokot hanya mengenyam pendidikan Sekolah Dasar(SD), dan Sekolah Menengah Pertama(SMP).

Hal ini yang menyebabkan pengelolaan dan penghasilan ikan di masyarakat nelayan Marapokot pada Bulan April sampai September 2016 mengalami penurunan, yakni hasil penangkapannya: pada Bulan April: 64.623 kg, Mei: 61.994 kg, Juni: 72.753 kg, Juli 19.200 kg, Agustus 23. 142 kg dan

September: 17.469 kg. Permasalahan ini pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya yaitu H.Mardjoeki,MM dengan judul pemberdayaan masyarakat pesisir pantai utara daerah kabupaten Cirebon, menunjukkan bahwa pemberdayaan pesisir tidak dapat dilakukan sendiri akan tetapi perlu adanya kerja sama yang simultan dan lintas sektoral.³

Secara ideal pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan hidup dalam pemenuhan kebutuhannya. Kenyataan yang terjadi di masyarakat nelayan Marapokot pemberdayaan masyarakat masih minim dan kurangnya modal dalam mengelola tambak yang menyebabkan hasil penangkapan kurang. Hal ini diduga karena kurangnya peran Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai motivator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Marapokot.

Menurut Syamsi peranan pemerintah dalam program pemberdayaan meliputi lima hal, yaitu:

1. Sebagai motivator

Dimana pemerintah beserta aparatnya, baik ditingkat pusat maupun kabupaten sampai di pedesaan harus mampu mendorong segenap lapisan masyarakat berperan secara aktif dalam program pemberdayaan.

2. Sebagai dinamisator

Yaitu pemerintah harus bergerak dinamis dalam melaksanakan program pembangunan dan dapat mempengaruhi masyarakat untuk ikut dinamis, sehingga mudah digerakkan dalam pemberdayaan.

³Jurnal ekonomi,Drs.H.Mardjoeki MM,Thn 2012,hlm 57

3. Sebagai katalisator

Dalam arti bahwa pemerintah beserta aparatnya harus mampu memberikan contoh serta kecekatan gerak tanpa mengorbankan kualitas hasilnya.

4. Sebagai stabilisator

Dimana pemerintah dan aparatnya harus mampu menciptakan kestabilan kegiatan pemberdayaan, tahan terhadap goncangan, baik dari luar maupun dari dalam masyarakat itu sendiri. Stabilisasi dalam hal ini meliputi bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. stabilitas merupakan prasarat mutlak bagi kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan program pemberdayaan.

5. Sebagai modernisator

Dalam arti bahwa pemerintah dan seluruh aparatnya harus mengusahakan dinamika dalam masyarakat, mementingkan kepentingan masyarakat dan persamaan hak.⁴

Peran pemerintah Sebagai motivator, dimana pemerintah beserta aparatnya, baik ditingkat pusat maupun kabupaten sampai di pedesaan harus mampu mendorong segenap lapisan masyarakat berperan secara aktif dalam program pemberdayaan. Pemberian motivasi ini biasanya melalui pelatihan namun bisa juga melalui bimbingan.⁵

Penelitian ini setidaknya penting artinya bagi kajian studi ilmu pemerintahan karena pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu alternatif peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan masyarakat. Dengan

⁴Syamsi, Ibnu. 1989. *Pokok-pokok kebijaksanaan, perencanaan, pemrograman dan penganggaran pembangunan tingkat nasional dan regional* (Jakarta : CV.Rajawali)

⁵Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, Thn 2001.

demikian penelitian ini lebih cocok menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena dan kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Peran Dinas Perikanan Dan Kelautan Sebagai motivator Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Daerah Pesisir Maropokot Kabupaten Nagekeo.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi pokok permasalahannya adalah: Bagaimanakah Peran Dinas Perikanan Dan Kelautan Sebagai Motivator Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Maropokot Kabupaten Nagekeo?

1.3 Tujuan Dan Kegunaan

1.3.1 Tujuan

Untuk menggambarkan peran dinas perikanan dan kelautan sebagai motivator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di daerah pesisir Maropokot Kabupaten Nagekeo.

1.3.2 Kegunaan

1. Sebagai bahan masukan untuk pemerintah dan lembaga terkait untuk memecahkan masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat pesisir maropokot kecamatan aesa kabupaten nagekeo.

2. Sebagai bahan referensi untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan.